

## DAFTAR PUSTAKA

- Darise, Nurlan. *Pengelolaan Pajak Daerah*. Jakarta: PT. Indeks Kelompok Gramedia. 2007.
- G. Kartasapoetra, E. Komaruddin. (1989). *Pajak Bumi dan Bangunan Prosedur dan Pelaksanaannya*. Diterbitkan oleh Bina Aksara, Jakarta
- Mardiasmo, *Perpajakan Edisi Terbaru 2016*. Yogyakarta: penerbit Andi.
- Mardiasmo, *Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2018*. Yogyakarta: penerbit Andi.
- Mardiasmo, *Otonomi Dan Manajemen Keuangan Daerah*, Jakarta: Bumi Aksara. 2001
- Novie, Amalia Sandra. (2010). *Analisis Tingkat Akurasi Penetapan NJOP Tanah Terhadap Nilai Pasar Dengan Metode Assessment Sales Ratio (Studi Kasus Di Kecamatan Kelapa Gading Kotamadya Jakarta Utara)*. Institut bisnis dan informatika Indonesia (IBII).
- Patrick Purnomo, harijanto Subijono. (2016). *Analisa Penetapan Nilai Jual Ojek Pajak (NJOP) Bumi PT. Ciputra Internasional Manado*. Jurnal Fakultas Ekonomi Bisnis Jurusan Akuntansi Volume 4 Nomor 1.
- Retno, Maria Emelia K (2016). *Pengalihan Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Sektor Pedesaan – Perkotaan Dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Di Kota Cimahi Tahun 2014*. Jurnal Bina Mulia Hukum, Volume 1 Nomor 1.
- Suandy, Erly. *Perpajakan*. Jakarta. Salemba Empat 2002
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono, 2013. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono, 2016. *Metode Penelitian Kualitatif: Untuk penelitian yang bersifat: eksploratif, enterpretif, interaktif, dan konstruktif*. Bandung: Alfabeta.
- Suryawati, Rindah Febriana, Harwida, Gita Arasy, dan Suryadi. (2010). *Analisa Penetapan NJOP (Nilai Jual Objek Pajak) Pajak Bumi Terhadap Nilai Pasar Dengan Menggunakan Metode Assessment Sales Ratio*. Jurnal

Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Volume 3 Nomor 1. Universitas Trunojoyo.

Waluyo. (2017). *Perpajakan Indonesia*. Edisi 12. Jakarta: Salemba Empat.

Sumber Peraturan Perundang-undangan:

Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 523/KMK.04/1998  
Tentang Penentuan Klasifikasi Dan Besarnya Nilai Jual Objek Pajak  
Sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi Dan Bangunan.

Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 20 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 208/PMK.07/2018.  
Tentang Pedoman Penilaian Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan  
Perkotaan.

Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 244 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis  
Dan Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan.

Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 458 Tahun 2017 Tentang Petunjuk  
Pelaksanaan Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah.

Peraturan Walikota Bandung Nomor 1405 Tahun 2016 Tentang Kedudukan,  
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja BPPD Kota  
Bandung.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2016 Tentang  
Ketentuan Umum Dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah.

Peraturan Menteri Keuangan No. 67/PMK.03/2011 Tentang Penyesuaian  
Besarnya Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak Bumi Dan Bangunan.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1945 *Tentang Perekonomian Bersama*.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 *Tentang Penerimaan Pajak Bumi dan  
Bangunan*.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 *Tentang Perimbangan Keuangan Pusat  
dan Daerah*.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 *Tentang Penagihan Pajak Dengan Surat  
Paksa*.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 *Tentang perpajakan Keuangan Pusat dan  
Daerah*.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 *Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.*

Undang-Undang No 23 Tahun 2014 *Tentang Pemerintahan Daerah.*

Sumber Internet:

Dea,Andriyawan.2020.BPPD Kota Bandung Kejar Piutang PBB Rp.194 miliar.

<https://bandung.bisnis.com/bppd-kota-bandung-kejar-piutang-pbb-rp194miliar>

<http://data.bandung.go.id/apbd/index.php/apbd/pendapatan/2018>

<https://bandungkota.bps.go.id>



IKOPIN